



**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA KABUPATEN MANGGARAI
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan kabupaten Manggarai Kota Ruteng)**

Diana Westi Jebian¹, Cindy Getah Trisna June²

¹ westinjebian@gmail.com , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka
Malang, Indonesia

² cindy.june@unmer.ac.id , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka
Malang, Indonesia

Article history:

Received: 2019-08-10

Revised: 2019-01-12

Accepted: 2020-15-02

✉ Corresponding Author:

Name author: Diana Westi Jebian

E-mail: westinjebian@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the readiness of the Manggarai Regency Financial Agency as indicated by commitment, human resources, infrastructure and information systems; to find out the obstacles in the implementation of PP. 71 of 2010, regarding government accounting standards (SAP) and to find out which strategy models face obstacles in the implementation of Government Regulation no. 71 of 2010 concerning accrual-based government accounting standards (SAP). This type of research is descriptive qualitative. This research was conducted by taking an object at the Manggarai Regency Financial Agency which is located at Jl. Cathedral No. 3 Ruteng, flores.

The types of data used in this study are primary data and secondary data. Methods of data analysis using descriptive analysis. Based on the analysis of previous data, the readiness of the Manggarai Regency Financial Board which is indicated by commitment, human resources, infrastructure and information systems can be concluded that BKKM seen from the integrity / commitment parameter is a very ready category, and for the readiness of

human resources, infrastructure and information systems is a category Ready. The strategy model faces obstacles in the implementation of PP NO. 71 of 2010 concerning accrual-based SAP is the presence of technical guidance and training related to accrual-based SAP as well as adding a computer network that is already systemically with the SIMDA program.

Keywords: Accrual Based SAP, Commitment, Human Resources, Infrastructure and Information Systems.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Badan Keuangan Kabupaten Manggarai yang diindikasikan dengan komitmen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi; untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No. 71 tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) dan untuk mengetahui model strategi menghadapi kendala dalam implementasi PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek di Badan Keuangan Kabupaten Manggarai yang beralamat di Jl. Katedral No. 3 Ruteng, flores.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data sebelumnya maka kesiapan Badan Keuangan Kabupaten Manggarai yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa BKKM dilihat dari parameter integritas/komitmen adalah kategori sangat siap, dan untuk kesiapan SDM, sarana prasarana dan sistem informasi adalah kategori siap. Model strategi menghadapi kendala dalam implementasi PP NO. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual adalah dengan adanya bimbingan teknik dan pelatihan terkait SAP berbasis akrual serta menambah jaringan komputer yang sudah secara tersistem dengan program simda.

Kata kunci : SAP Berbasis Akrual, Komitmen, SDM, Sarana Prasarana dan sistem informasi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik yang semakin pesat, hal ini disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Dalam salah satu penjelasan di Undang-Undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan

dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Kemudian sebagai pedoman pelaksanaannya terbit pula peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintah, namun hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi yang baru. Hingga terbit Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Pada PP No.71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014. Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem informasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan komitmen. Kesuksesan penerapan akuntansi berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementrian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya BPKD (Badang Pemeriksa Keuangan Daerah) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Pendukung yang akan membantu BPKD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Secara yuridis, keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintah Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak

dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi. Di kabupaten Manggarai sumber daya manusianya masih belum memadai terutama yang memahami tentang SAP berbasis akrual, terbukti dalam penyusunan jurnal masih mengharapkan satu orang saja dalam menyusunnya. Dengan adanya perkembangan sistem akuntansi dan pengembangan SDM dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual yang dijelaskan diatas sehingga hal itu menarik penulis untuk mengambil judul dalam bentuk Tugas Akhir EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA KABUPATEN MANGGARAI (Studi kasus pada Badan Keuangan kabupaten Manggarai)

2. LANDASAN TEORI

Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah badan eksekutif, sedangkan legislatifnya adalah DPRD”. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, jadi terdapat pemisahan yang nyata antara lembaga legislative dan eksekutif. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan UU otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntansi Pemerintah

Perkembangan akuntansi pemerintah secara umum diseluruh Negara sudah berkembang meskipun tidak sepesat perkembangan akuntansi bisnis. Pengertian akuntansi pemerintah tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisi sebagai aktivitas pemeberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan kepada

para pengguna dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut Bahtisr Arif, Muchlis, Iskandar (2003) Akuntansi Pemerintah dapat didefinisikan menjadi: suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Jenis yang dicatat dalam akuntansi pemerintah adalah transaksi keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan transaksi dalam akuntansi bisnis.

Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah

Perkembangan akuntansi di tingkat pemerintah daerah telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran sejak tahun 1986. Dalam akuntansi pemerintah data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutive, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Penerapan akuntansi pada pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menrapkan sistem pencatatan *single entry*. Menurut Abdul Halim (2004) tentang pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan *system tata buku tunggal atau tata buku*, yaitu: Dalam system ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Dan kelemahannya adalah kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol.

Standar Akuntansi Pemerintah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah SAP. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah adalah: prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Tentang SAP, Ruang Lingkup SAP disajikan sebagai berikut:

1. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, daerah dan satuan organisasi dilinglup pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara ekslisit pada setiap standar yang diterbitkan.

Komitmen

Menurut Robbin dan judge (2007). Komitmen adalah : “sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi”. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen merupakan suatu sikap atau tingkah laku seseorang terhadap organisasi berupa loyalitas serta tercapainya visi, misi dan juga tujuan organisasi. Bisa disebut memiliki komitmen apabila seseorang memiliki komitmen yang tinggi kepada organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara bersama 4 orang yang terlibat dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bukti, catatan atau laporan historis yang telah dipublikasikan yang diperoleh dari perusahaan seperti sejarah singkat dan struktur organisasi pada Badan Keuangan kabupaten Manggarai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta observasi kepada objek penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program simda adalah aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan, yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dan pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintahan daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Simda terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga *outputnya* dapat digunakan pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan *monitoring* terhadap kinerja pemerintah daerah. Simda merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

1. Tujuan dan manfaat simda

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan simda.
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan simda.
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*.
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi simda keuangan daerah terintegritasi (BPKP, 2008) adalah: Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama, Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin), Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana :

- a. *Output* dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

Penilaian kesiapan pemerintah kabupaten Manggarai dalam implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dengan melihat indikator : komitmen/integritas, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, serta sistem informasi adalah pemerintah Kabupaten Manggarai dikategorikan sangat siap untuk melaksanakan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Hal ini didasarkan pada masing-masing parameter yang pada umumnya menyatakan siap dan sangat siap. Pengukuran kesiapan dari Pemerintah kabupaten Manggarai dilihat dari parameter integritas dan komitmen secara keseluruhan pada umumnya menyatakan sangat siap dan siap dari masing-masing indikator. Hal ini dijelaskan oleh 6 orang narasumber yang menyatakan sangat siap menerima akuntansi pemerintah berbasis akrual. Menurut hasil wawancara dengan ketua bidang akuntansi pada tanggal 19 Juni 2020. "Integritas dan komitmen itu sangat penting dalam melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Dengan adanya integritas dan komitmen menjadi landasan yang kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam Badan Keuangan Kabupaten Manggarai.

Penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap dalam menerapkan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Hal ini dilandasi beberapa pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi yang akan mendukung keberhasilan penerapan melaksanakan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Pentingnya sumber daya manusia dibidang akuntansi dan keuangan dijelaskan dengan hasil wawancara ketua bidang akuntansi Badan Keuangan pada tanggal 19 Juni 2020 menyatakan bahwa : "sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai

akuntansi yang akan mengerjakannya. Kesiapan SDM dalam hal ini pegawai akuntansi didukung dengan kesiapan pengetahuan (keahlian), keterampilan dan pelatihan sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP”.

Sedangkan kesiapan infrastruktur (sarana prasarana) serta sistem informasi dalam penerapan SAP juga tidak kalah penting mengingat parameter kesiapan sarana dan sistem informasi berkaitan dengan pelaksanaan SAP, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesiapan dalam penerapan SAP dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tersebut, masih terdapat beberapa kendala. Adanya kelemahan dan kendala dalam rangka menerapkan SAP berbasis akrual, maka Badan Keuangan Kabupaten Manggarai perlu lebih fokus dan optimal dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan adanya bimbingan teknik dan pelatihan tentang SAP berbasis akrual serta menambah jaringan komputer yang sudah secara sistem khususnya program yang berbasis akrual seperti program SIMDA dalam upaya mendukung optimalisasi bidang tugas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang akuntansi pada tanggal 19 Juni 2020 menyatakan bahwa : “penerapan SAP berbasis akrual ini tidak mudah untuk diterapkan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Banyak juga kendala dan hambatan yang harus diperhatikan dan ditingkatkan seperti Sumber daya manusia dan sistemnya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menerapkan SAP berbasis akrual sudah siap berdasarkan komitmen, SDM, sistem informasi dan infrastruktur. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, seperti kualitas SDM yang belum maksimal terutama SDM dibagian akuntansi serta sarana prasarana yang belum lengkap. Dari beberapa kendala ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan bimbingan teknik terkait akuntansi akrual serta menambah jaringan komputer yang sudah secara sistem dengan program yang berkaitan dengan akuntansi akrual, seperti program simda.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Ririz Setiawati Kusuma yang berjudul Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jember). Kemiripannya seperti tahun dimulainya penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu tahun 2015, kesiapan pemerintah berdasarkan komitmen dalam kategori sangat siap dan berdasarkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan juga sistem informasi dalam kategori siap.

Pada bab sebelumnya, penentuan siap atau tidaknya pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menerapkan SAP berbasis akrual adalah dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 4 orang narasumber. Wawancara dilaksanakan dengan teknik tidak teratur terhadap 4 orang narasumber yang ada di Badan Keuangan Kabupaten Manggarai. Narasumber yang diwawancarai secara insentif dengan menggunakan inisial, yaitu AJ, IS, AA, dan BT. Wawancara dengan inisial AJ dilaksanakan hari Juma't, 19 Juni 2020; narasumber

dengan inisial IS dan AA dilaksanakan hari Rabu, 24 Juni 2020; sedangkan narasumber dengan inisial BT dilaksanakan hari Kamis, 25 Juni 2020. Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan hasil data observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan selama masa magang dari bulan Februari sampai dengan April. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada.

Peneliti melakukan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data terkait kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual wajib dilaksanakan diseluruh sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang akan menjadi penanggung jawab adalah semua entitas pelaporan atau seluruh organisasi perangkat daerah (ODP).

Perlu pemahaman mendasar untuk melaksanakan sistem SAP berbasis akrual tersebut sehingga perlu waktu dan pelatihan dalam implementasi pelaksanaannya, karena SDM pengelola keuangan saat ini belum semuanya memahami sistem tersebut. SDM masih memerlukan diklat terkait SAP terutama yang menyangkut perubahan-perubahan peraturan sehingga segala kendala dalam pelaksanaan bisa dibagikan juga dalam diklat tersebut. PNS sebagai SDM sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanggungjawabnya. Punishment dan reward (hukuman dan penghargaan) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi agar lebih optimal dalam bekerja saat ini. Saat ini dalam mendukung kelancaran penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pemerintah kabupaten Manggarai telah menyiapkan sarana ruangan, sarana prasarana perangkat lunak serta sarana administrasi lainnya. Pada pemerintah kabupaten Manggarai sudah ada satu system/ perangkat lunak yang mendasarkan dan sistem yang digunakan yaitu sistem informasi manajemen daerah (simda).

Dalam pengimplementasian PP No. 71 tahun 2010, pemerintah Kabupaten Manggrai sudah menyiapkan sistem dan prosedur kebijakan akuntansi berbasis akrual, peningkatan kualitas SDM, saran/ pendapat pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap amanat PP No. 71 tahun 2010 adalah diperhatikannya pedoman sebagai petunjuk teknis maupun pelaksanaan sebagai pendukung, sehingga memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan PP No. 71 tahun 2010.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mengadakan pelatihan serta bimbingan teknik terkait standar akuntansi berbasis akrual dari segi sumber daya manusia (SDM), sedangkan dari segi infrastrukturnya adalah dengan cara menambah alat teknologi seperti komputer yang sudah secara tersistem dengan program simda agar penerapan SAP berbasis akrual berjalan dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Kesiapan pemerintah kabupaten Manggarai yang diindikasikan dengan komitmen, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Kabupaten Manggarai dilihat dari parameter integritas/komitmen adalah sangat siap dan dari parameter sumber daya manusia, system informasi dan sarana prasarana (infrastruktur) dalam kategori siap.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan alat teknologi seperti komputer.
3. Model strategi menghadapi kendala dalam implementasi PP No. 71 tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual adalah dengan adanya bimbingan teknik (bimtek) dan juga pelatihan terkait dengan SAP berbasis akrual serta menambah jaringan komputer yang sudah secara tersistem dengan program simda.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Bahtiar, Muchlis, Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan* : Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Elvis F Purba, Simanjuntak Parulian, *Metode Penelitian* : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011.

Fakhturozi Muhammad, *Infrastruktur, Permasalahan dan solusinya*: Sekre HATI, 2012
<http://hati.unit.itb.ac.id/?p=440>

Grigg (2000), Riris Setiawati , *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual*, Skripsi 2013.

Halim Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*: Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Indrianto Nur, Supomo Bambang, *Metode Penelitian Bisnis* : BPFE, Yogyakarta, 2002

Jadongan Sijabat, *Metodologi Penelitian Akuntansi* : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012.

Kusuma Riris Setiawati , *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan SAP Pemerintah Berbasis Akrual*, 2013. Hlm 32

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 : Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 : *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, Pasal 1

Robert L. Mathis, John H. Jackson : *Manajemen Sumber Daya Manusia*: Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm 22.

Robbins SP, Judge, *Perilaku Organisasi* : Salemba Empat, Jakarta, 2007